2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

Definisi dari Pajak Daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Lain-lain

Tabel 2.1 menyajikan tarif maksimal dari jenis-jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas.

Tabel 2.1. Jenis dan Tarif Maksimal Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	Tarif
1.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5 %
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10 %
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5 %
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20 %
5.	Pajak Hotel	10 %
6.	Pajak Restoran	10 %
7.	Pajak Hiburan	35 %
8.	Pajak Reklame	25 %
9.	Pajak Penerangan Jalan	10 %
10.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20 %
11.	Pajak Parkir	20 %

(Sumber: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000)

Tarif untuk masing-masing jenis pajak daerah sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan tarif maksimal untuk masing-masing jenis pajak. Untuk Pajak Daerah yang termasuk Pajak Propinsi, ditetapkan seragam di seluruh Indonesia, sedangkan Pajak Daerah yang termasuk dalam Pajak Kota/Kabupaten masih dapat ditinjau kembali oleh pihak pemerintah daerah dan dapat ditetapkan lebih rendah dari tarif maksimal yang telah ditentukan dan kemudian ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah setempat.

Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang baru sesuai dengan keadaan dan potensi dari masing-masing daerah, asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.

Maksud dari penentuan kriteria ini adalah, pajak yang akan ditetapkan oleh daerah untuk dipungut harus sesuai dengan pengertian pajak terutama dalam definisi iuran atau pungutan non-kontraprestasi langsung bagi masyarakat.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Adanya penentuan kriteria ini merupakan syarat utama dari pemungutan pajak di Indonesia, yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan asas domisili. Yaitu pemajakan yang didasarkan pada domisili dari Subjek Pajak. Selain itu, penentuan kriteria untuk memberikan batasan dari berlakunya ketentuan pajak tersebut di pemerintah kota/kabupaten yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kriteria ini dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.

Penentuan kriteria ini ditujukan untuk membuka lapangan pajak bagi daerah kota/kabupaten dan menghindari pengenaan pajak ganda. Lapangan pajak bagi daerah kota/kabupaten adalah lapangan yang belum digarap oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Tetapi bisa saja untuk menjaga kepentingan umum, pemerintah daerah propinsi ataupun pemerintah pusat menarik objek yang telah dikenakan oleh daerah kota/kabupaten, atau pemerintah pusat menarik objek yang telah dikenakan pemerintah propinsi.

5. Potensinya memadai.

Maksud dari penentuan kriteria ini adalah hasil pajak harus cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhan yang harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Maksud dari penentuan kriteria ini adalah bahwa pemungutan pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Yang dimaksud aspek keadilan dalam kriteria ini adalah kepastian dalam penentuan Objek dan Subjek Pajak, sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tarif ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Aspek kemampuan masyarakat adalah kemampuan Subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian Lingkungan.

Maksud dari penentuan kriteria ini adalah bahwa pemungutan pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti tidak memberi peluang kepada pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat untuk merusak lingkungan. Alasannya, kerusakan lingkungan merupakan tambahan beban bagi pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat yang bersangkutan.

Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu potensi pendapatan daerah dapat menjadi objek pengenaan Pajak Daerah:

1. Kecukupan dan Elastisitas
2. Pemerataan
3. Kemampuan administrative
4. Penerimaan politis
5. Kecocokan suatu pajak

2.1.1. Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Daerah

Cara menghitung besarnya pajak daerah adalah:

Rumus 2.1. Pajak Daerah

$\text{Pajak Daerah} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

(Sumber: Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000)

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya. Dimungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteran pajak dan penagihan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Selain itu, Wajib Pajak bisa melakukan penghitungan dan pembayaran sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

2.1.2. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah

Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan pajak daerah yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Keputusan Pembetulan
Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
10. Surat Keputusan Keberatan
Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, adalah

pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Arti dari jasa di sini adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Objek Retribusi terdiri dari:

1. Objek Retribusi Jasa Umum

adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha

adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi terdiri dari:

1. Subjek Retribusi Jasa Umum

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Subjek Retribusi Jasa Usaha

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran
7. Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Peta
8. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum:
 - a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial
 - g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha:
 - a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka azas desentralisasi
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.2.1. Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah

Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, yang mana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

2.2.2. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Retribusi Daerah

Formulir-formulir yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan, menghitung dan menyetor retribusi daerah yang terutang oleh wajib retribusi, meliputi:

1. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)

Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

4. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

2.3. Perlakuan Akuntansi

Pembukuan menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan akuntansi, akan membahas tentang pengukuran, definisi pos, pengakuan dan penyajian.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. (Ikatan Akuntan Indonesia 2002:23)

Definisi Pos adalah pos-pos atau perkiraan yang muncul dalam neraca, terdiri atas berbagai perkiraan aktiva, kewajiban dan kekayaan. Merupakan sebuah daftar perkiraan khusus atau terperinci disediakan dalam bagian perkiraan perusahaan. Pos-pos yang biasanya tampak dalam neraca saldo adalah:

1. Kas adalah jenis aset yang paling mudah untuk diuangkan yang merupakan media standar untuk melakukan pertukaran dan merupakan dasar mengukur dan menghitung hal-hal lain. Yang masuk dalam kategori kas adalah semua kas yang tersedia baik dalam bentuk kas kecil maupun rekening di dalam bank.
2. Piutang adalah hak atau tagihan satu pihak kepada pihak lain yang dapat berupa uang, barang maupun jasa.
3. Persediaan adalah jenis asset yang disimpan untuk tujuan diperjualbelikan dalam kegiatan umum usaha atau barang yang disimpan dengan tujuan untuk diproses menjadi barang baru untuk dijual.
4. Hutang dagang adalah kewajiban kepada pihak lain yang timbul karena pembelian barang maupun jasa yang dibeli secara kredit. Hutang ini termasuk pada hutang jangka pendek yang waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun
5. Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari suatu transaksi, yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun.
6. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan asset dari suatu entitas atau penyerahan kewajiban pada suatu masa mulai dari memproduksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
7. Beban adalah arus keluar atau penggunaan asset yang menyebabkan manfaat suatu aset mengalami penurunan timbulnya kewajiban pada suatu masa mulai dari memproduksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijaksanaan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan khusus. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila:

1. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
2. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(Ikatan Akuntan Indonesia 2002:23)

Penyajian merupakan istilah yang digunakan dalam laporan pemeriksaan yang memuat pengungkapan yang memuaskan, perincian yang beralasan dan tidak mempunyai bias. Pengungkapan yang memuaskan memerlukan informasi yang diperlukan untuk menjabarkan laporan keuangan. Perincian yang beralasan memerlukan penyajian klasifikasi laporan khusus yang luasnya tertentu, seperti aktiva yang tidak berwujud yang dibagi menjadi beberapa macam. Tidak bias berarti bahwa pemeriksaanya bebas dan tidak memihak, serta tidak melebihkan pihak yang satu dari pihak yang lainnya.

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu. (Siegel dan Shim 1994:352)

2.4. Peninjauan Pajak Dan Retribusi Daerah Dari Aspek Akuntansi Dan Pajak

Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian pada penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol serta retribusi ijin gangguan. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah akan dijelaskan secara lengkap serta akan ditinjau baik dari sisi akuntansi maupun pajak.

Undang-Undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dalam penjabaran lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dan yang disebut sebagai Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

2.4.1.1. Peninjauan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Cara menghitung besarnya pajak Hotel adalah:

Rumus 2.2 Pajak Hotel

$\text{Pajak Hotel} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

(Sumber: Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2003)

- Dasar pengenaan pajak = jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Tata cara pemungutan Pajak Hotel adalah:

1. Pengusaha Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
2. Dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada nomer 1, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada Hotel. Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha hotel, melaporkan perhitungan pajak yang telah dipungut dari subjek pajak dengan menggunakan SPTPD dan harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah itu berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dan apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

2.4.1.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Hotel

Pada proses pengukuran jumlah pajak hotel, yang dicatat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Pajak hotel termasuk sebagai pajak tidak langsung, dalam artian pihak hotel hanya bertindak sebagai pemungut pajak hotel

dari subyek pajak yaitu tamu hotel, yang kemudian akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena pihak hotel hanyalah bertindak sebagai pemungut dan pajak yang berhasil dipungut nantinya harus disetorkan ke Kas Daerah, maka hotel mencatat pajak hotel tersebut pada pos hutang pajak yang termasuk sebagai hutang lancar karena harus disetorkan dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terutangnya pajak. Pajak hotel diakui terutang pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak. Pada Laporan Keuangan, Hutang Pajak Hotel akan tampak pada neraca dan jumlah yang disajikan pada neraca pada akhir periode adalah sebesar jumlah pajak hotel yang telah dipungut dari subyek pajak namun masih belum disetorkan.

Selain dipungut pajak hotel, biasanya hotel juga akan mengenakan tambahan biaya *service charge* terhadap tamu hotel sebesar 11% (sebelas persen). Tambahan biaya *service charge* ini juga bukan merupakan hak hotel melainkan merupakan hak karyawan yang bisa dianggap sebagai *tips* atas pelayanannya kepada tamu hotel, karena *service charge* tersebut bukan merupakan hak hotel melainkan hak karyawan, maka hotel yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang *service charge*. Waktu pengakuannya sama dengan saat pemungutan pajak hotel atau pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak. Pada Laporan Keuangan, Hutang *service charge* akan tampak pada neraca dan jumlah yang disajikan di neraca pada akhir periode adalah sebesar jumlah *service charge* yang berhasil dipungut dari tamu hotel namun belum dibagikan kepada karyawan.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah:

Kas / Piutang Dagang	xxx
Pendapatan	xxx
Hutang Pajak	xxx
Hutang service charge	xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak hotel ke Kas Daerah adalah:

Hutang Pajak	xxx
Kas	xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat pembagian *service charge* yang berhasil dipungut kepada karyawan adalah:

Hutang <i>service charge</i>	xxx
Kas	xxx

2.4.2. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah:

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk Daerah Surabaya ditetapkan peredarannya tidak melebihi batas Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Pengusaha Restoran yang bersangkutan merupakan Wajib Pajak Restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah untuk restoran berlokasi.

2.4.2.1. Peninjauan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Cara menghitung besarnya Pajak Restoran adalah:

Rumus 2.3. Pajak Restoran

$\text{Pajak Restoran} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

(Sumber: Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2003)

- Dasar pengenaan pajak = jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Tata cara pemungutan Pajak Restoran adalah:

1. Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
2. Dalam hal Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada nomer 1, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada Restoran. Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha restoran, melaporkan perhitungan pajak yang telah dipungut dari subjek pajak dengan menggunakan SPTPD dan harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah itu berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dan apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

2.4.2.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Restoran

Pada proses pengukuran jumlah pajak restoran, yang dicatat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Pajak restoran termasuk sebagai pajak tidak langsung, dalam artian pihak restoran hanya bertindak sebagai pemungut pajak restoran dari subyek pajak yaitu tamu restoran, yang kemudian akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena pihak restoran hanyalah bertindak sebagai pemungut dan pajak yang berhasil dipungut nantinya harus disetorkan kepada pemerintah daerah, maka restoran mencatat pajak restoran tersebut pada pos hutang pajak yang termasuk sebagai hutang lancar karena harus disetorkan dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terutangnya pajak. Pajak restoran diakui terutang pada saat hotel melakukan penagihan kepada subyek pajak. Pada Laporan Keuangan, Hutang Pajak Restoran akan tampak pada neraca dan jumlah yang disajikan pada neraca pada akhir periode adalah sebesar jumlah pajak restoran yang telah dipungut dari subyek pajak namun masih belum disetorkan.

Selain dipungut pajak restoran, terkadang restoran juga akan mengenakan tambahan biaya *service charge* terhadap tamu restoran sebesar 11% (sebelas persen). Tambahan biaya *service charge* ini juga bukan merupakan hak restoran melainkan merupakan hak karyawan yang bisa dianggap sebagai *tips* atas pelayanannya kepada tamu restoran, karena *service charge* tersebut bukan merupakan hak restoran

melainkan hak karyawan, maka restoran yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang *service charge*. Waktu pengakuannya sama dengan saat pemungutan pajak hotel atau pada saat restoran melakukan penagihan kepada subyek pajak. Pada Laporan Keuangan, Hutang *service charge* akan tampak pada neraca dan jumlah yang disajikan di neraca pada akhir periode adalah sebesar jumlah *service charge* yang berhasil dipungut dari tamu hotel namun belum dibagikan kepada karyawan.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah:

Kas / Piutang Dagang	xxx
Pendapatan	xxx
Hutang Pajak	xxx
Hutang <i>service charge</i>	xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak restoran kepada pemerintah daerah adalah:

Hutang Pajak	xxx
Kas	xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat pembagian *service charge* yang berhasil dipungut kepada karyawan adalah:

Hutang <i>service charge</i>	xxx
Kas	xxx

2.4.3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, oleh karena itu

setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, yang menurut UU No, 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu

2.4.3.1. Peninjauan Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Rumus untuk menghitung Pajak Hiburan adalah:

Rumus 2.4. Pajak Hiburan

$\text{Pajak Hiburan} = \text{Harga Tanda Masuk} \times 30 \%$
--

(Sumber: Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan)

Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan, yang disebut jugsan dengan Harga Tanda Masuk (HTM). Harga Tanda Masuk (HTM) adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.

Pajak Hiburan tetap harus disetorkan kepada pemerintah daerah apabila diselenggarakan hiburan, baik hiburan yang dipungut bayaran maupun hiburan yang tidak dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah di mana hiburan diselenggarakan.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Dalam hal pembayaran diterima Wajib Pajak sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD dan harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah itu berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak tersebut menggunakan SSPD. Dan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dan apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

2.4.3.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Hiburan

Pada proses pengukuran jumlah pajak hiburan yang dicatat adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan, yang disebut jugsan dengan Harga Tanda Masuk (HTM). Harga Tanda Masuk (HTM) adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.

Bila dilihat secara akuntansi dan ditinjau dari siapakah yang menanggung HTM, maka akan timbul dua pemikiran. Pertama, apabila hiburan yang diselenggarakan dipungut bayaran, maka hal ini berarti HTM ditanggung oleh penonton. Karena HTM ditanggung oleh penonton dan penyelenggara hiburan hanya merupakan pihak yang menerima pembayaran dan kemudian sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran yang diterima harus disetorkan ke Kas Daerah. Maka secara akuntansi penyelenggara hiburan akan mencatat pajak hiburan yang

dipungutnya dalam pos hutang pajak hiburan. Kedua, apabila hiburan yang diselenggarakan tidak dipungut bayaran, sedangkan atas hiburan yang diselenggarakan penyelenggara hiburan harus tetap membayar pajak hiburan kepada pemerintah daerah. Maka secara akuntansi penyelenggara hiburan tersebut boleh mencatat pajak hiburan yang telah dibayarkan tersebut dalam pos beban karena pembayaran pajak hiburan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dibayar sehubungan dengan hiburan yang diselenggarakan.

Dalam hal penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka pajak hiburan diakui terutang pada saat pembayaran diterima atau pada saat penyelenggaraan hiburan dengan melihat mana yang lebih dulu terjadi. Sedangkan bila penyelenggaraan hiburan tersebut tidak dipungut bayaran, maka pajak hiburan akan diakui sebagai beban pada saat hiburan tersebut diselenggarakan.

Begitu pula dalam hal penyajian, apabila dicatat sebagai hutang maka akan disajikan pada neraca dan jumlah yang disajikan pada neraca pada akhir periode adalah jumlah pajak hiburan yang telah dipungut dari pengunjung namun belum disetorkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban maka akan disajikan dalam laporan laba rugi dan jumlah yang tersaji pada laporan laba rugi pada suatu periode adalah total jumlah pajak hiburan yang telah dibayarkan selama periode tersebut.

Apabila penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, maka jurnal yang dibuat oleh penyelenggara hiburan adalah:

Kas	xxx	
	Pendapatan	xxx
	Hutang pajak	xxx

Apabila penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, maka jurnal yang dibuat oleh penyelenggara hiburan adalah:

Beban pajak	xxx	
	Hutang pajak	xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat penyeteroran pajak hiburan ke Kas Daerah adalah:

Hutang pajak	xxx
Kas	xxx

2.4.4. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.

Obyek Pajak Reklame adalah:

1. reklame papan (*billboard*)
2. reklame kain
3. reklame temple (*sticker*)
4. reklame selebaran
5. reklame berjalan
6. reklame kendaraan
7. reklame peragaan
8. reklame udara
9. reklame suara
10. reklame slide atau rekaman film

Yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib Pajak Reklame

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.4.4.1. Peninjauan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Jumlah pajak reklame yang dibayarkan bervariasi tergantung pada lokasi penempatan, luas, jenis, ketinggian, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Sedangkan nilai sewa reklame yang menjadi dasar pengenaan pajak, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pajak Reklame, dengan tarif pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 paling tinggi adalah sebesar 25%. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, sehingga jumlah pajak reklame yang harus dibayar ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKPD. Pajak reklame dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pajak reklame terutang sejak dikeluarkannya surat izin penyelenggaraan reklame. Pajak yang terutang dibayar oleh wajib pajak ke Kas Daerah dengan menggunakan media setoran yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah. SKPD yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SKPD diterima oleh wajib pajak.

2.4.4.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Reklame

Pada proses pengukuran jumlah pajak reklame yang dicatat adalah sebesar nilai yang tertera pada SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyelenggara reklame akan mencatat pajak reklame yang telah dibayarkan pada pos beban pajak, karena pajak reklame yang dibayar tersebut merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan reklame.

Pada saat SKPD diterima pada awal periode atau begitu surat izin reklame dikeluarkan maka penyelenggara reklame akan mencatatnya terlebih dahulu sebagai beban dibayar di muka yang merupakan elemen aset, karena manfaat dari pemasangan reklame tersebut belum dinikmati. Secara bertahap jumlah pajak

reklame yang dicatat sebagai beban dibayar di muka akan berkurang dan diakui sebagai beban pajak secara periodik.

Pajak reklame diakui sebagai beban pajak pada akhir setiap periode dan diakui secara proposional sesuai masa manfaat yang telah terpakai. Pada Laporan Keuangan, beban pajak reklame akan tersaji pada laporan laba rugi sebesar jumlah pajak reklame yang telah dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Jurnal yang dibuat oleh penyelenggara hiburan pada saat pembayaran pajak reklame, sesaat setelah surat izin keluar adalah:

Beban dibayar di muka	xxx	
Kas		xxx

Dan jurnal untuk mengakui jumlah beban pajak reklame pada akhir tiap periode adalah:

Beban pajak	xxx	
Beban dibayar di muka		xxx

2.4.5. Pajak Penerangan Jalan

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud jika:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik

3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

2.4.5.1. Peninjauan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Penerangan jalan adalah:

Rumus 2.5. Pajak Penerangan Jalan

$$PPJ = 9 \% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

(Sumber: Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan)

Tarif pajak sebesar 9% (sembilan persen) adalah tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dalam hal tenaga listrik yang digunakan berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan tidak dipungut bayaran, maka cara menghitung Nilai Jual Tenaga Listrik adalah:

Rumus 2.6 Nilai Jual Tenaga Listrik

$$\text{Nilai Jual Tenaga Listrik} = \text{Kapasitas Daya} \times \text{Jam Operasi} \times \text{Harga Listrik}$$

(Sumber: Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan)

Penjelasan:

- Kapasitas Daya = kapasitas tersedia
- Jam Operasi = lama penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik
- Harga Listrik = harga listrik yang berlaku di wilayah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Hasil perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan menggunakan SKPD. Pajak Penerangan Jalan dipungut setiap berakhirnya masa pajak dan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Pajak yang terutang dibayar oleh wajib pajak ke Kas Daerah dengan menggunakan media setoran yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Daerah. SKPD.

2.4.5.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan

Pada proses pengukuran jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dicatat adalah sebesar nilai yang tertera pada SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Wajib Pajak akan mencatat pajak reklame yang telah dibayarkan pada pos beban pajak, karena Pajak Penerangan Jalan yang dibayar tersebut merupakan pemakaian atas tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pada saat SKPD diterima pada akhir periode setelah manfaat dari penerangan jalan tersebut dinikmati wajib pajak akan mencatatnya sebagai beban, karena manfaatnya telah habis dinikmati pada periode yang bersangkutan. Pada Laporan Keuangan, beban Pajak Penerangan Jalan akan tersaji pada laporan laba rugi sebesar jumlah Pajak Penerangan Jalan yang telah dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Jurnal yang dibuat oleh wajib pajak pada saat SKPD diterima adalah:

Beban pajak	xxx
Hutang pajak	xxx

Dan jurnal yang dibuat pada saat melakukan pembayarak ke Kas Daerah adalah:

Hutang pajak	xxx
Kas	xxx

2.4.6. Pajak Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Obyek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Yang tidak termasuk oyek pajak parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
3. Penyelenggaraan tempat parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subyek Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik tau penyelenggara tempat parkir. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.4.6.1. Peninjauan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Rumus untuk menghitung Pajak Parkir adalah:

Rumus 2.7. Pajak Parkir

$\text{Pajak Parkir} = 20\% \times \text{Harga Karcis} \times \text{Penggunaan Tempat Parkir}$
--

(Sumber: Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan perparkiran)

Tarif 20% (dua puluh persen) adalah tarif maksimal yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir gedung/pelataran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah harga karcis atau jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pajak Parkir tetap harus disetorkan kepada pemerintah daerah apabila diselenggarakan tempat parkir, baik penyelenggaraan tempat parkir tersebut dipungut bayaran maupun yang tidak dipungut bayaran. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir beralokasi.

Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Setelah itu berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Dan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Dan apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

2.4.6.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Parkir

Pada proses pengukuran jumlah pajak parkir yang dicatat adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu harga karcis atau jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Bila dilihat secara akuntansi dan ditinjau dari siapakah yang menanggung karcis parkir, maka akan timbul dua pemikiran. Pertama, apabila tempat parkir yang diselenggarakan dipungut bayaran, maka hal ini berarti karcis parkir ditanggung oleh pengguna. Karena karcis parkir ditanggung oleh pengguna dan penyelenggara tempat parkir hanya merupakan pihak yang menerima pembayaran dan kemudian sejumlah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang diterima harus disetorkan ke Kas Daerah. Maka secara akuntansi penyelenggara tempat parkir akan mencatat pajak parkir yang dipungutnya dalam pos hutang pajak parkir. Kedua, apabila tempat parkir yang diselenggarakan tidak dipungut bayaran, sedangkan atas tempat parkir yang diselenggarakan penyelenggara tempat parkir harus tetap membayar pajak parkir kepada pemerintah daerah. Maka secara akuntansi penyelenggara tempat parkir tersebut boleh mencatat pajak parkir yang telah dibayarkan tersebut dalam pos beban karena pembayaran pajak parkir tersebut merupakan fasilitas yang disediakan penyelenggara tempat parkir untuk suatu tujuan.

Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir dengan dipungut bayaran, maka pajak parkir diakui terutang pada saat pembayaran diterima atau pada saat tempat parkir yang disediakan digunakan dengan melihat mana yang lebih dulu terjadi. Sedangkan bila penyelenggaraan tempat parkir tersebut tidak dipungut bayaran, maka pajak parkir akan diakui sebagai beban, pada saat terjadi penggunaan tempat parkir.

Begitu pula dalam hal penyajian, apabila dicatat sebagai hutang maka akan disajikan pada neraca dan jumlah yang disajikan pada neraca pada akhir periode

adalah jumlah pajak parkir yang telah dipungut dari pengguna tempat parkir namun belum disetorkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban maka akan disajikan dalam laporan laba rugi dan jumlah yang tersaji pada laporan laba rugi pada suatu periode adalah total jumlah pajak parkir yang telah dibayarkan selama periode tersebut.

Apabila penyelenggaraan tempat parkir dengan dipungut bayaran, maka jurnal yang dibuat oleh penyelenggara tempat parkir adalah:

Kas	xxx
Pendapatan	xxx
Hutang pajak	xxx

Apabila penyelenggaraan tempat parkir yang tidak dipungut bayaran, maka jurnal yang dibuat oleh penyelenggara tempat parkir adalah:

Beban pajak	xxx
Hutang pajak	xxx

Dan jurnal yang terjadi pada saat penyetoran pajak parkir ke Kas Daerah adalah:

Hutang pajak	xxx
Kas	xxx

2.4.7. Retribusi

Retribusi yang dibahas adalah Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Ijin Gangguan adalah retribusi yang harus dibayar karena pemberian ijin dalam penjualan minuman beralkohol dan ijin gangguan terhadap lingkungan yang bersangkutan.

Obyek dari retribusi tersebut adalah atas ijin yang dikeluarkan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Subyek dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakannya.

2.4.7.1. Peninjauan Retribusi Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Besarnya retribusi yang harus dibayar ditentukan oleh Kepala Daerah yang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, yang mana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.

Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Wajib Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

2.4.7.2. Perlakuan Akuntansi Retribusi Daerah

Pada proses pengukuran, jumlah retribusi yang dicatat adalah sebesar yang terteta pada SKRD. Retribusi yang dibayar adalah retribusi yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sehingga layak untuk dicatat dalam pos beban. Retribusi diakui sebagai beban pada saat wajib retribusi yang bersangkutan telah menikmati manfaat dari pemberian retribusi ijin yang terkait. Pada Laporan Keuangan, retribusi yang telah dibayarkan selama periode tertentu akan tersaji pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan sebagai beban.

2.5. Pungutan Daerah Sebagai Biaya Fiskal

Yang dimaksud pungutan daerah di sini adalah pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, pengurangan pajak dan retribusi daerah memang tidak disebutkan secara tegas. Namun secara implisit menyebutkan bahwa 'pajak' (kecuali PPh) dapat menjadi

pengurang penghasilan bruto. Sementara itu, mengingat bahwa retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan jasa yang diserahkan pemerintah daerah, maka pungutan tersebut juga bisa dibiayakan secara fiskal.

Selengkapnya isi dari Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk menadapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan”

Jadi untuk dapat membebaskan pajak maupun retribusi daerah, setiap Wajib pajak tentunya harus memastikan bahwa pembayaran pungutan tersebut mempunyai korelasi langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 juga tertulis sebagai berikut:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- h. Pajak Penghasilan”

Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu makna, bahwa yang tidak boleh dikurangkan adalah Pajak Penghasilan, jadi jenis-jenis pajak lainnya selain Pajak Penghasilan dapat dikurangkan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu Pajak dan Retribusi daerah yang telah kita bayarkan boleh dianggap sebagai biaya fiskal asal ada hubungannya dengan kegiatan usaha.

Supaya pungutan daerah bisa menjadi biaya fiskal maka juga harus memenuhi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;
- b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- c. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus.

Demi kepastian penerapan peraturan perundang-undangan, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur beberapa persyaratan tertentu agar pungutan daerah bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, yaitu:

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000;
2. Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/Norma Penghitungan Khusus;
3. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan;
4. Tidak dibebankan kembali pada harga perolehan barang.

Memang dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-02/PJ.42/2002, maupun penegasan tambahan dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-516/PJ.313/2003, tidak disebutkan bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, untuk dapat membebaskan pajak daerah sebagai pengurang penghasilan bruto, meskipun begitu Wajib Pajak semestinya dapat memenuhi seluruh persyaratan di atas.

Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi maka pungutan daerah yang dibayarkan bisa menjadi biaya fiskal, sebagai pengurang penghasilan bruto, yang akan tampak pada Laporan Laba Rugi.